

BAB I

PENDAHULUAN

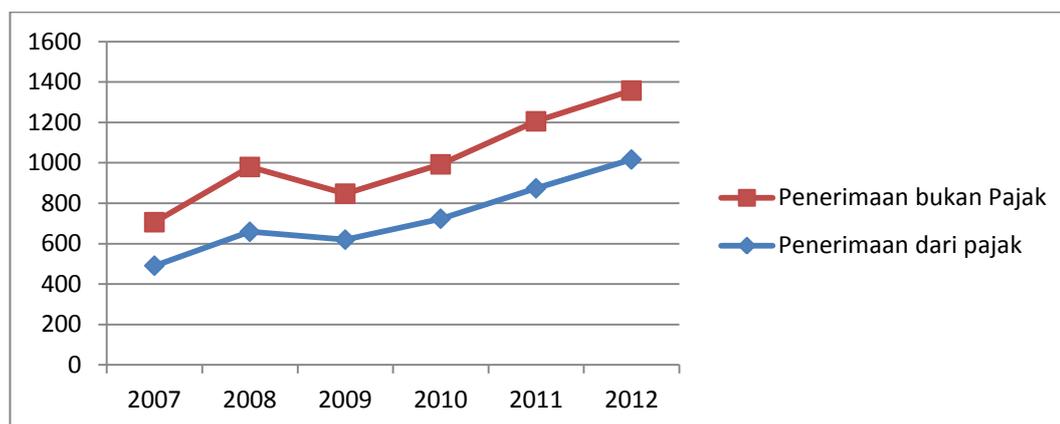
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang harus terus melakukan inovasi dalam pembangunannya. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan, menaikkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta meluas untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan rutin semakin meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang kita inginkan. Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan rutin diatur oleh pemerintah lewat keuangan negara (Anonim dalam Prasetyo, 2010: 1).

Pembiayaan pembangunan di Indonesia sangatlah bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pemasukan dana kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berbagai macam target dan rencana pembangunan disusun yang membutuhkan dana tidaklah sedikit. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu memperhatikan penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak yang merupakan sumber penerimaan kas negara perlu diperhatikan dan

ditingkatkan, karena penerimaan negara setiap tahunnya lebih besar dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1: Penerimaan Keuangan Negara



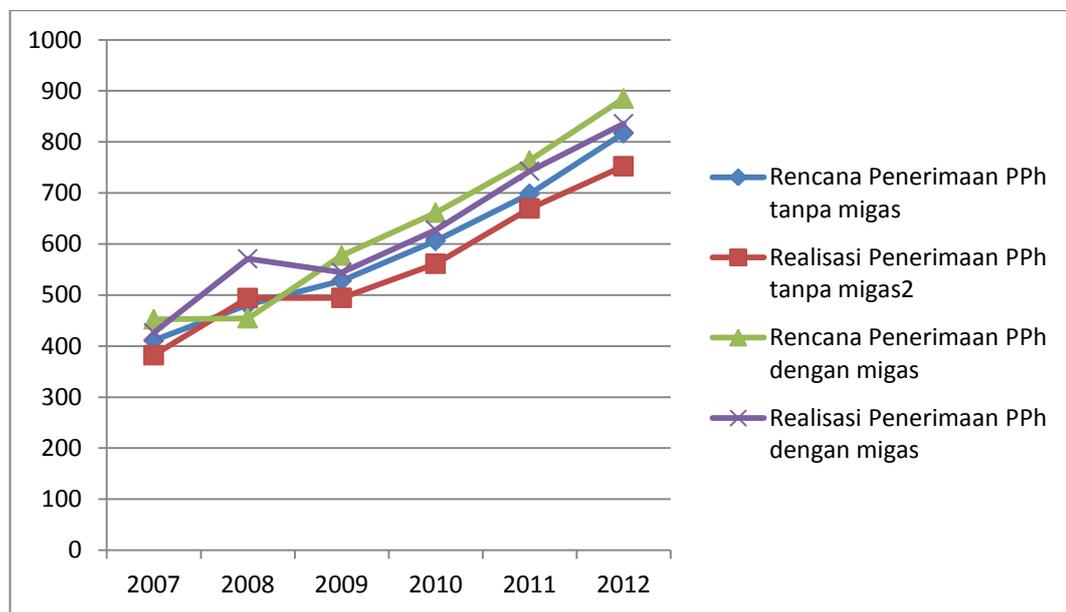
Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan kas negara sebagian besar berasal dari sektor perpajakan, sehingga penerimaan sektor pajak ini perlu diperhatikan secara seksama. Pajak tidak hanya ada di Indonesia, dan sudah menjadi fenomena umum pajak merupakan sumber penerimaan negara di seluruh dunia (Pandiangan, 2008: 65).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Syahab dalam Sarizaen, 2012: 1). Dalam rangka peningkatan APBN ini Direktorat Jendral Pajak memiliki misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi dalam Sarizaen, 2012: 1). Namun, meskipun berbagai

upaya telah dilakukan, tapi penerimaan pajak di Indonesia tetap masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam grafik rencana penerimaan pajak dan realisasinya di bawah ini.

**Grafik 2: Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara
(Dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: Annual Report Direktorat Jendral Pajak 2010 dan 2011.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2007-2012 realisasi penerimaan pajak masih dibawah dari jumlah yang direncanakan atau ditargetkan. Dalam rangka menggali penerimaan sektor pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan baru yang dikenal dengan Reformasi perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 2000. Kebijakan ini pada hakekatnya merupakan suatu

langkah perubahan yang mendasar antara lain, menyangkut sistem pemungutan, sistem sanksi, sistem penerapan, kemudahan dan kapasitas hukum. Langkah tersebut bertujuan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak baik melalui upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak. Dalam upaya ekstensifikasi yaitu perluasan subjek maupun objek pajak baru. Demikian pula dalam upaya intensifikasi yaitu, penggalan lebih dalam dan sumber-sumber penghasilan perpajakan diharapkan agar dapat memungkinkan penerimaan pajak meningkat (Prastyo, 2010: 4).

Upaya peningkatan penerimaan pajak memerlukan banyak hal yang perlu dilakukan selain pengupayaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya. Untuk lebih mudah dalam upaya tersebut perlu diidentifikasi faktor apa saja yang dapat meningkatkan penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan lebih terfokus dalam peningkatan tiap-tiap faktor tersebut. Sehubungan dengan hal ini beberapa orang telah melakukan penelitian, Prastyo (2011) mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pajak secara positif. Sedangkan Purnamasari (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang digunakan dengan mendasarkan pada perbandingan kenaikan Produk Domestik bruto.

Produk Domestik bruto (PDB) adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan maupun warga negara asing yang bekerja di wilayah tersebut (Kunawangsih dan Antyo, 2006: 26). Jumlah PDB dalam suatu negara menggambarkan kemampuan atau pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Semakin tinggi/laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat khususnya wajib pajak untuk membayar pajak. Peningkatan kemampuan untuk membayar pajak juga dapat dipicu dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat suatu negara tinggi maka kemampuan untuk membayar pajakpun semakin besar. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Prastyo (2011) yang menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dapat mempengaruhi penerimaan pajak secara positif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pendapatan perkapita dan produk domestik bruto yang tinggi. Selain itu PDB dan pendapatan perkapita Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 pendapatan perkapita mencapai \$33.300, meningkat dari tahun 2011 yang hanya mencapai \$30.005, sedangkan produk domestik bruto mencapai 3,5 triliun pada tahun 2012 tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun ini benar-benar tinggi dan telah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Cahyono (2013) Peningkatan pendapatan perkapita dan produk domestik bruto ini dipastikan akan terus terjadi di Indonesia. Namun, bersamaan dengan hal ini penerimaan pajak di Indonesia masih tetap tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis menarik sebuah judul untuk penelitian yaitu **“Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Indonesia masih memiliki masalah kurangnya/minimnya penerimaan dari sektor perpajakan.
- b. Negara sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mencapai target-target pembangunan yang direncanakan.
- c. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun sampai saat ini penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengajukan permasalahan yang akan diteliti yaitu : Seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema penelitian.

1.5.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian dapat memberikan kontribusi dan wasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai gambaran dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penerimaan pajak di Indonesia, serta adanya

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan Penerimaan Pajak

- b. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan informasi selanjutnya dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, ekonomi dan perpajakan di Indonesia.